11.229 TON BERPOTENSI DISERAP BULOG

Petani Bisa Nikmati Harga Gabah Sesuai HPP

SLEMAN (KR) - Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman telah memetakan wilayah yang berpotensi panen di bulan Februari hingga April. Angka perkiraan luas panen Februari sampai dengan April 2025 sebesar 13.439 ha, perkiraan produksi padi 85.729 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau 69.329 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 39.381 ton beras.

"Dari hasil pemetaan ini, 40 persennya berpotensi akan diserap oleh Bulog gabah setara beras sebanyak 11.229 ton. Tata cara pembelian gabah petani ini mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Gabah Kering Panen dan Beras untuk Cadangan Beras Pemerintah," ungkap Plt Kepala DP3 Sleman Suparmono saat mendampingi kegiatan pembelian gabah petani di Kelompok Tani Ngudi Makmur Brintikan Tirtomartani Kalasan, Kamis (13/2).

Menurutnya, DP3 Sleman menugaskan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mensosialisasikan program serap gabah ini kepada Kelompok Tani/Gapoktan. Apabila Kelompok Tani/Gapoktan bersedia untuk menjual hasil panennya kepada Perum Bulog, akan dikoordinasikan dengan tim Perum Bulog. Petani menyiapkan alat panen secara mandiri, kemudian hasil panen ditimbang dan diangkut dengan armada dari Perum Bulog.

Dijelaskan Suparmono, beberapa keadaan agar gabah hasil panen petani dapat diserap Bulog yaitu petani memberitahukan rencana panen kepada Bulog pada H-2. Sehingga petugas dapat melakukan pengecekan lokasi, KTP dan lahan yang akan dipanen berada di wilayah Kabupaten Sleman serta jumlah gabah yang akan diambil Bulog sudah dalam karung minimal sebanyak 1-2 ton.

"Secara administrasi, syaratnya FC KTP dan FC buku rekening, petani menandatangani PO, Surat Permohonan Pembayaran, kuitansi bermaterai, surat kuasa (apabila nomor rekening tujuan transfer berbeda nama petani yang menjual gabahnya). Setelah semua persyaratan lengkap pembayaran dilakukan via transfer bank dengan estimasi waktu 1-2 hari," jelasnya.

Suparmono juga menyambut baik rencana pemerintah menerbitkan instruksi presiden tentang kewajiban pembelian harga gabah di tingkat petani sesuai HPP yang berlaku bagi Perum Bulog dan penggilingan-penggilingan padi. Regulasi tersebut akan memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan petani dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Ditambahkan, pada 4 Februari 2025 di ruang Rapat Kenanga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, DP3 Sleman telah ditandatangani komitmen bersama penyerapan gabah petani sesuai HPP antara DP3 Sleman, Perum Bulog Kantor Wilayah DIY, DPD Perpadi Kabupaten Sleman dan Kodim 0732/Sleman.

"Perum Bulog akan melakukan pembelian gabah (GKP) di tingkat petani dengan harga Rp 6.500 perkg dan beras dengan harga Rp 12.000 perkg di gudang Perum Bulog DIY. Selanjutnya kami akan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan serap gabah dan atau beras sesuai dengan komitmen bersama tersebut," ungkap Suparmono. **(Has)-f**

KR-Istimewa

Plt Kepala DP3 Sleman Suparmono (baju batik) mengecek gabah hasil panen petani yang akan diusulkan untuk diserap Bulog.

MASALAH ADMINISTRASI TERSELESAIKAN

Siswa SMK Nasional Berbah Bisa Ujian

BERBAH (KR) - Persoalan tidak bisanya siswa kelas 12 SMK Nasional Berbah mengikuti ujian akhir sekolah karena masalah administrasi, telah diselesaikan. Siswa dipastikan dapat mengikuti ujian susulan dan masalah administrasi pun selesai dengan bantuan dana dari pihak swasta dan pemerintah.

Penyelesaian persoalan ini dilakukan lewat mediasi yang difasilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY di Kantor Disdikpora DIY, Rabu (12/2) sore. Mediasi tersebut mempertemukan orangtua siswa, siswa, pihak sekolah, dan pihak terkait lainnya.

Orangtua siswa Ariwantoko mengaku lega karena persoalan anaknya dapat diselesaikan dengan baik. Pihaknya berterima kasih atas mediasi yang dilakukan oleh Disdikpora DIY agar persoalan anaknya bisa tuntas. Dengan begitu anaknya bisa lulus dengan baik dan mendapat ijazah.

"Saya sudah menganggap clear masalah ini. Saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah sudah mau mengerti kondisi saya. Alhamdulillah anak saya sudah dibantu untuk biaya. Saya merasa lega," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdikpora DIY Suhirman mengatakan, dari proses mediasi ini ternyata persoalan utamanya adalah kurangnya komunikasi antara orangtua siswa, siswa dan pihak sekolah. Namun dirinya bersyukur semua pihak dapat berdiskusi dengan baik dan mendapat kesepakatan bersama.

"Semua sudah menyepakati bahwa anak ini, besok sudah bisa untuk melaksanakan ujian sekolah. Dan sudah tidak ada permasalahan lagi. Harapannya, anak bisa melanjutkan proses pembelajaran dengan baik sampai selesai," imbuh Suhirman.

Sementara Kepala SMK Nasional Berbah Edy Muchlasin mengungkapkan, tidak ada tindakan pengusiran siswa dari kelas ujian karena belum menyelesaikan persyaratan administrasi. Pihaknya telah berupaya membantu orangtua siswa untuk mengajukan keringanan biaya pendidikan. Karena pada dasarnya sekolah masih memberikan toleransi agar semua siswa bisa tetap mengikuti ujian.

"Kami sebelumnya sudah bicara dengan orangtua siswa, jika memang tidak mampu, bisa kami bantu mengajukan keringanan tapi syaratnya harus ada surat miskin. Sayangnya orangtua siswa tidak punya. Tapi sekarang sudah ada pihak yang membantu menanggung biayanya, jadi masalah sudah selesai," terangnya.

Edy menegaskan akan menjamin siswa yang bersangkutan dapat mengikuti ujian dan bersekolah sampai lulus dengan aman dan tenang. **(Ria)-f**

EFISIENSI ANGGARAN BERDAMPAK PADA APBD

Siapkan Opsi WFH dan Zoom Meeting

SLEMAN (KR) - Efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo dimungkinkan bakal memengaruhi APBD Sleman, terutama dana yang ditransfer dari pemerintah pusat.

Untuk mengantisipasi pemangkasan anggaran tersebut, Pemkab Sleman mau tidak mau juga harus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya penerapan *work from home* (WFH) atau penerapan zoom meeting.

"Kalau memang harus efisiensi anggaran, tentu saja kami siap. Opsi WFG atau penerapan zoom meeting dan peniadaan grup diskusi jadi pertimbangan untuk dilaksanakan," ungkap Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa kepada wartawan, kemarin.

KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa

Namun menurut Danang, sampai saat ini Pemkab Sleman belum menerapkan langkah-langkah tersebut. Pemkab Sleman masih menunggu dan akan melakukan kajian apabila APBD terutama dana transfer dari pusat tidak seperti yang diharapkan.

"Kalau soal efisiensi anggaran sudah kami lakukan. Misalnya dengan mengurangi perjalanan dinas, pengurangan biaya operasioal dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak. Hanya saja untuk kegiatan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, tetap jadi prioritas," tegas Danang.

Sementara Sekda Sleman Susmiarto mengaku opsi WFH bukan berarti tidak mungkin diterapkan meski kebijakan itu saat ini belum diberlakukan. Pemkab Sleman akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menerapkan sistem itu, apabila APBD terutama yang ditransfer dari pusat merosot tajam.

"Kami masih menunggu SE (Surat Edaran) dari Kemendagri. Menghitung pemotongan dana transfer dari pusat. Jika pendapatan APBD menurun drastis, baru mengkaji lebih lanjut terkait WFH tersebut," jelasnya. **(Has)-f**

KEMENAG SLEMAN GELAR RAKER

Komitmen Membangun Zona Integritas

KR-Istimewa

Sidik Pramono saat membuka raker Tahun 2025.

SLEMAN (KR) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sleman menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2025, Rabu (12/2). Dalam kesempatan itu, Kemenag Sleman komitmen membangun zona integritas dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman H Sidik Pramono mengatakan, penguatan zona integritas menjadi fokus utama guna mewujudkan Kemenag Sleman sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen membangun zona integritas harus melibatkan seluruh jajaran satuan kerja.

"Inovasi pelayanan di tingkat KUA juga perlu terus didorong agar semakin berdampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Sebagai langkah nyata dalam memperkuat pengawasan, Sidik Pramono juga mengingatkan komitmen untuk menolak gratifikasi. Selain itu membangun komunikasi yang baik dengan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sleman guna memastikan efektivitas penyelesaian teknisnya.

"Kami ingatkan kepada seluruh jajaran untuk menolak gratifikasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kasubbag TU Kankemenag Sleman H Sangaji SH menyampaikan, raker ini bertujuan menyusun dan menyelaraskan program kerja tahun 2025. Tujuannya agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Ini untuk menyusun dan menyelaraskan program kerja tahun 2025," katanya. **(Sni)-f**

DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

BRI Terapkan Strategi Pengelolaan Segmen Nasabah Berbasis Piramida

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali menunjukkan perannya sebagai pilar utama perbankan nasional dengan mempertegas komitmen dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan fokus kuat pada pengembangan UMKM, serta didukung jaringan luas dan inovasi berkelanjutan, BRI terus menjadi mitra strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada diskusi eksklusif di kanal YouTube Hermanto Tanoko bertajuk "BBRI Pilar Utama Perbankan Nasional: Peluang Besar di 2025".

KR-Istimewa

Direktur Utama BRI Sunarso.

Sunarso mengungkapkan bahwa BRI telah mengimplementasikan strategi pengelolaan segmen nasabah berbasis piramida. Pada dasar piramida, terdapat segmen mikro dan ultra mikro yang mencakup mayoritas nasabah BRI. Segmen ini menjadi fokus utama untuk berbagai program inklusif yang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

"BRI secara konsisten mengarahkan sumber daya untuk mendukung segmen mikro dan ultra mikro melalui inovasi layanan keuangan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Ini sejalan dengan misi kami untuk memperkuat perekonomian masyarakat," ujarnya.

Di lapisan tengah piramida, segmen menengah menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih stabil dan menjadi salah satu fokus utama BRI dalam menjaga keseimbangan portofolio kredit. Sedangkan pada puncak piramida, BRI melayani segmen korporasi besar yang, meski jumlah nasabahnya lebih kecil, memiliki nilai kredit signifikan yang mendukung pembangunan nasional.

Sunarso juga menjelaskan bahwa permintaan kredit di sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. "Ketika daya beli melemah, permintaan kredit di sektor UMKM, terutama mikro, cenderung mengalami penurunan," paparnya.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, BRI mengadopsi strategi "slowing down" untuk menurunkan laju pertumbuhan kredit di segmen mikro. Langkah ini diselaraskan dengan penguatan penyaluran kredit pada segmen menengah dan konsumer, sehingga tercipta ekosistem pembiayaan yang lebih seimbang dan berdaya tahan.

BRI juga terus berinovasi melalui transformasi digital, dengan menghadirkan layanan seperti BRImo dan BRISPOT yang mempermudah akses pembiayaan dan mempercepat proses kredit. Inovasi ini mendukung peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah-wilayah terpencil.

"Melalui transformasi digital dan pendekatan berbasis piramida, BRI optimistis dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tambah Sunarso. **(*)**

KR-Istimewa

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, BRI Terapkan Strategi Pengelolaan Segmen Nasabah Berbasis Piramida.